

SEJARAH ISLAM MASA DINASTI UMAYYAH : BERDIRINYA, POLA PEMERINTAHAN, EKSPANSI WILAYAH, DAN PERADABAN ISLAM

Anisha Febrianti¹, Aline Andjani², Karina³, Annatacyay Nayla Meisari⁴, Muhammad Farhandani Raendra⁵, Supian Ramli⁶
anishafebrianti28@gmail.com¹, alineandjani03@gmail.com²,
karinajambi420@gmail.com³, annatacyanayla@gmail.com⁴, farhandani941@gmail.com⁵,
supian.ramli@unja.ac.id⁶
Universitas Jambi

ABSTRAK

Artikel ini mengupas secara komprehensif tentang Dinasti Umayyah, yang menjadi salah satu periode penting dalam sejarah Islam. Dinasti Umayyah didirikan pada tahun 661 M oleh Muawiyah bin Abu Sufyan setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir. Peristiwa berdirinya dinasti ini menjadi tonggak transisi dari sistem pemerintahan berbasis syura yang bersifat egaliter menuju sistem monarki hereditas yang lebih terpusat. Dinasti Umayyah memperkenalkan struktur pemerintahan yang baru, dengan fokus pada sentralisasi kekuasaan, penguatan birokrasi, dan pengelolaan wilayah yang tersebar luas. Ibukotanya, Damaskus, menjadi pusat administrasi yang strategis dan simbol kekuasaan dinasti ini. Dalam hal ekspansi wilayah, Dinasti Umayyah dikenal sebagai salah satu kekhalifahan dengan wilayah terluas dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinan para khalifah, seperti Muawiyah, Abdul Malik bin Marwan, dan Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan Dinasti Umayyah meluas dari Semenanjung Iberia (Spanyol) di barat hingga perbatasan India dan Asia Tengah di timur. Ekspansi ini tidak hanya bermotif politik dan militer, tetapi juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam dan memperkuat pengaruh budaya Arab. Proses ini berdampak signifikan terhadap pembentukan masyarakat multietnis dan multibudaya di wilayah kekuasaan mereka. Selain itu, Dinasti Umayyah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Pada masa ini, terjadi kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk arsitektur, seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pembangunan masjid-masjid megah seperti Masjid Agung Damaskus dan pengembangan sistem irigasi menunjukkan pencapaian teknis dan estetika yang tinggi. Di bidang administrasi, mereka mengembangkan sistem pajak dan mata uang yang terstandarisasi, yang menjadi model bagi pemerintahan Islam selanjutnya. Namun, masa pemerintahan Dinasti Umayyah juga tidak terlepas dari tantangan, termasuk pemberontakan internal dan konflik sektarian antara Sunni dan Syiah, yang akhirnya menyebabkan kejatuhan dinasti ini pada tahun 750 M dan digantikan oleh Dinasti Abbasiyah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses berdirinya Dinasti Umayyah, pola pemerintahan yang diterapkan, strategi ekspansi wilayah yang dijalankan, serta kontribusinya dalam membangun fondasi peradaban Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang holistik tentang peran Dinasti Umayyah dalam sejarah Islam dan pengaruhnya yang masih terasa hingga masa kini.

Kata kunci: Dinasti Umayyah, Sejarah Islam, Transisi Pemerintahan, Ekspansi Wilayah, Peradaban Islam, Kontribusi Budaya, Administrasi Kekhalifahan.

ABSTRACT

This article comprehensively examines the Umayyad Dynasty, which was one of the important periods in Islamic history. The Umayyad Dynasty was founded in 661 AD by Muawiyah bin Abu Sufyan after the end of the Caliphate of the Rasyidin. The founding of this dynasty was a milestone in the transition from an egalitarian shura-based government system to a more centralized hereditary monarchy system. The Umayyad Dynasty introduced a new government structure, with a focus on centralizing power, strengthening the bureaucracy, and managing a widespread territory. Its capital, Damascus, became a strategic administrative center and a symbol of the dynasty's power. In terms of territorial expansion, the Umayyad Dynasty is known as one of the caliphates with the largest territory in Islamic history. Under the leadership of its caliphs, such as Muawiyah, Abdul

Malik bin Marwan, and Al-Walid bin Abdul Malik, the power of the Umayyad Dynasty expanded from the Iberian Peninsula (Spain) in the west to the borders of India and Central Asia in the east. This expansion was not only politically and militarily motivated, but also aimed at spreading Islam and strengthening the influence of Arab culture. This process had a significant impact on the formation of a multi-ethnic and multicultural society in their territory. In addition, the Umayyad Dynasty made great contributions to the development of Islamic civilization. During this period, progress was made in various fields, including architecture, art, science, and technology. The construction of magnificent mosques such as the Great Mosque of Damascus and the development of irrigation systems showed high technical and aesthetic achievements. In the field of administration, they developed a standardized tax system and currency, which became a model for subsequent Islamic governments. However, the reign of the Umayyad Dynasty was not without challenges, including internal rebellions and sectarian conflicts between Sunnis and Shiites, which eventually led to the fall of this dynasty in 750 AD and was replaced by the Abbasid Dynasty. This article aims to provide an in-depth understanding of the process of the establishment of the Umayyad Dynasty, the government patterns implemented, the territorial expansion strategies carried out, and its contribution to building the foundations of Islamic civilization. This study is expected to provide holistic insight into the role of the Umayyad Dynasty in Islamic history and its influence that is still felt today.

Keywords: *Umayyad Dynasty, Islamic History, Government Transition, Territorial Expansion, Islamic Civilization, Cultural Contribution, Caliphate Administration.*

PENDAHULUAN

Dinasti Umayyah merupakan salah satu era penting dalam sejarah Islam yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan politik, sosial, budaya, dan peradaban dunia Islam. Berdiri pada tahun 661 M di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, dinasti ini menjadi tonggak awal dari sistem pemerintahan monarki Islam yang berlangsung selama hampir sembilan dekade hingga 750 M. Perubahan ini terjadi setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, di mana sistem pemerintahan yang sebelumnya berbasis musyawarah bergeser menjadi bentuk monarki hereditas yang berpusat di Damaskus, Suriah. Sebagai dinasti Islam pertama yang memerintah dalam skala kekaisaran, Dinasti Umayyah menghadirkan dinamika baru dalam tata kelola pemerintahan, ekspansi wilayah, dan transformasi budaya lintas kawasan.

Berdirinya Dinasti Umayyah merupakan respons terhadap krisis politik yang muncul setelah Perang Saudara Islam pertama (fitnah kubra) antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Setelah wafatnya Ali, Muawiyah berhasil menyatukan kekuatan politik Islam dan mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Pengalihan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus oleh Muawiyah bukan hanya sebuah langkah strategis untuk memperkuat kendali administratif, tetapi juga menandai perubahan orientasi politik dari tradisi Islam awal yang lebih berfokus pada Arab ke model pemerintahan yang lebih inklusif dan bercorak kekaisaran. Damaskus menjadi pusat kekuasaan yang memudahkan kontrol terhadap wilayah luas yang terbentang dari Jazirah Arab hingga Mediterania.

Salah satu aspek menonjol dari Dinasti Umayyah adalah pola pemerintahan yang diterapkan. Sistem monarki hereditas yang diusung oleh dinasti ini mengukuhkan kekuasaan berdasarkan garis keturunan, yang berbeda dengan pendekatan sebelumnya di mana khalifah dipilih melalui musyawarah. Model pemerintahan ini memberikan stabilitas politik pada awal pemerintahan Umayyah, meskipun di kemudian hari menimbulkan kritik dari berbagai kelompok, terutama karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip egalitarian dalam Islam. Struktur pemerintahan Dinasti Umayyah juga ditandai dengan birokrasi yang terorganisir, yang mengadopsi banyak praktik dari kekaisaran Bizantium dan Persia. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memungkinkan integrasi budaya yang lebih luas di wilayah kekuasaan mereka.

Ekspansi wilayah menjadi salah satu pencapaian terbesar Dinasti Umayyah. Dalam waktu kurang dari satu abad, wilayah kekuasaan mereka mencakup tiga benua, mulai dari Semenanjung Iberia (Spanyol) di barat hingga wilayah Sindh di India di timur. Penaklukan ini tidak hanya memperluas kekuasaan politik Islam, tetapi juga mempercepat penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah baru. Ekspansi ke Barat, seperti penaklukan Andalusia, membawa Islam ke Eropa dan meninggalkan jejak yang bertahan hingga berabad-abad. Sementara itu, ekspansi ke Timur memungkinkan integrasi budaya India dan Asia Tengah ke dalam dunia Islam. Jalur perdagangan dan komunikasi yang diciptakan selama periode ini memperkuat konektivitas antarwilayah dan menciptakan interaksi lintas budaya yang dinamis.

Selain ekspansi wilayah, Dinasti Umayyah juga dikenal atas kontribusinya terhadap perkembangan peradaban Islam. Masa pemerintahan mereka ditandai dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk masjid, istana, dan jalan raya yang menghubungkan berbagai wilayah kekuasaan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Masjid Umayyah di Damaskus, yang hingga kini menjadi simbol kemajuan arsitektur dan seni Islam pada masa itu. Di bidang ilmu pengetahuan, Dinasti Umayyah mulai mendorong pengumpulan dan penerjemahan teks-teks klasik, yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa Dinasti Abbasiyah.

Namun, tidak semua aspek pemerintahan Dinasti Umayyah berjalan mulus. Ketegangan internal, seperti konflik antara suku-suku Arab Utara (Qais) dan Arab Selatan (Yaman), serta ketidakpuasan dari kalangan non-Arab (mawali), menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh dinasti ini. Selain itu, kecenderungan elit Umayyah untuk memusatkan kekuasaan dan kekayaan di tangan keluarga kerajaan sering kali memicu pemberontakan dari kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan. Faktor-faktor ini akhirnya melemahkan Dinasti Umayyah, yang berujung pada keruntuhannya pada tahun 750 M setelah kekalahan dari Dinasti Abbasiyah dalam pertempuran yang menentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam sejarah Dinasti Umayyah dengan fokus pada empat aspek utama, yaitu proses berdirinya dinasti, pola pemerintahan yang diterapkan, ekspansi wilayah yang dicapai, dan kontribusinya terhadap peradaban Islam. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis historis yang mengintegrasikan berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk kronik sejarah, catatan arkeologis, dan literatur modern. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang peran Dinasti Umayyah dalam membangun fondasi peradaban Islam dan signifikansinya dalam sejarah dunia.

Secara keseluruhan, Dinasti Umayyah merupakan era yang kompleks dan penuh dinamika. Di satu sisi, mereka mencatat prestasi luar biasa dalam bidang politik, militer, dan budaya. Di sisi lain, konflik internal dan kritik terhadap legitimasi mereka mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mengelola kekaisaran yang luas dan beragam. Kajian ini tidak hanya berupaya untuk mengevaluasi warisan Dinasti Umayyah, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai bagaimana dinasti ini membentuk sejarah Islam dan dunia pada masa itu.

METODOLOGI

Dalam metode penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah studi dalam bidang literatur. Literatur merupakan suatu metode dimana yang digunakan agar dapat mengumpulkan sumber dari data-data serta pola pengungkapan sebagai bahan pembahasan dalam penulisan artikel ini. Dan studi literature yang dilakukan ini juga melalui cara membaca serta mempelajari berbagai buku-buku bacaan baik itu di dalam jurnal-jurnal yang bersangkutan dan relevan yang bertujuan sebagai sumber utama yang berkaitan dengan

suatu kajian sehingga dapat dilakukanlah analisis agar bisa mendapatkan hasil ide dan juga gagasan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal pembentukan dinasti Umayyah

Setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, kedudukannya diambil alih oleh putranya, Hasan. Ia memegang kekhalifahan setelah kematian ayahnya, Ali bin Abi Thalib, melalui pembaiatan yang dilakukan oleh penduduk Kufah, sebuah kota di Irak, yang terletak di bagian barat sungai Eufрат, dan ia tinggal di sana selama kurang lebih enam bulan. Suatu hari, Mu'awiyah bin Abi Sufyan menemui Hasan untuk melakukan perundingan. Ia berusaha agar Hasan menyerahkan kekuasaannya sebagai khalifah kepadanya dengan syarat bahwa tidak ada satupun yang akan menuntutnya dari kalangan penduduk Madinah, Hijaz, dan Irak. Masalah yang dihadapi pada masa ayahnya, Ali bin Abi Thalib, berkaitan dengan pelunasan hutang-hutangnya, dan Mu'awiyah setuju untuk memenuhi hal tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Hasan, sehingga perjanjian damai pun dibuat. Dengan tercapainya perjanjian ini, kedamaian terjalin antara kedua pihak. Perjanjian tersebut selanjutnya berhasil mempersatukan kembali umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yaitu kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Di sisi lain, perjanjian itu juga menjadikan Mu'awiyah sebagai penguasa yang absolut dalam sejarah pemerintahan Islam, di mana tahun 41 H/661 M atau tahun persatuan dikenal dalam sejarah sebagai tahun ketika umat Islam bersatu ('am jama'ah). Selain itu, 'am jama'ah juga menandai berakhirnya era Khulafa' al-Rasyidin dan permulaan era pemerintahan kerajaan; dimulainya kekuasaan Dinasti Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Seorang pemikir Islam, as-Suyuthi, mengemukakan bahwa peristiwa itu merupakan manifestasi dari mu'jizat nabawiyah dalam sebuah Hadis, "Allah Swt. akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari kalangan muslim." Hasan Ali bin Abi Thalib R. a. diangkat sebagai khalifah pada tahun 41 H di bulan Rabi'ul Awal—sedangkan menurut beberapa pendapat, disebut juga pada Jumadil Awal—untuk mencegah pertikaian yang terjadi dalam pemerintahan Islam. Hasan kemudian meninggalkan kota Kufah menuju Madinah dan menetap di kota tersebut hingga ia meninggal karena diracuni oleh istrinya sendiri, Ja'dah binti Asy'ast bin Qaish, yang belakangan diperistri oleh Yazid bin Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan wafat pada tahun 49 H atau 5 Rabi'ul Awal 50 H. Sebagai khalifah atau raja pertama Dinasti Bani Umayyah, Mu'awiyah bin Abi Sufyan (661-680 M) mendirikan pemerintahannya dengan mengikuti sistem kerajaan; kekuasaan diwariskan secara turun-temurun, dan khalifah-khalifah berikutnya sering bersikap otoriter. Meskipun merupakan anak dari pasangan Sufyan bin Harb dan Hindun binti Utbah bin Rabi'ah, Mu'awiyah bin Abi Sufyan adalah salah satu sahabat Rasulullah Saw. Ayahnya termasuk dalam kelompok pemimpin Quraisy yang terhormat dan dihormati pada zaman jahiliyah, dengan kekayaan yang melimpah. Mu'awiyah adalah salah satu dari sekian banyak sahabat yang berperan sebagai penulis wahyu. Ia bahkan sempat meminta kepada Rasulullah Saw. untuk menikahi putrinya, Azzah binti Abi Sufyan, walaupun hal itu tidak terwujud. Setelah penaklukan wilayah Syam, khalifah Umar mengangkat Mu'awiyah sebagai walinya (gubernur) di kota Damaskus, menggantikan saudaranya Yazid bin Abi Sufyan, dan jabatan tersebut berlanjut di masa Khalifah Usman bin Affan, yang bahkan memperluas daerah kekuasaannya. Pada akhirnya, Mu'awiyah sukses mendirikan pusat pemerintahan di kota Damaskus dan memerintah selama 40 tahun. Namun, ketika Khalifah Usman dibunuh, penggantinya, Khalifah Ali bin Abi Thalib, memberi isyarat kepada Mu'awiyah dan para pembesar lainnya yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Usman untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Meskipun Mu'awiyah telah dicopot dari jabatannya sebagai gubernur Syam, penduduk Syam tetap

mendukungnya dan bahkan menentang Ali. Mu'awiyah menyatakan bahwa ia tidak akan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sampai mereka yang membunuh Usman diserahkan. Ia berpendapat bahwa Usman dibunuh secara zalim, yang menyebabkan terjadinya Perang Shiffin, di mana keputusan diambil melalui tahkim yang melibatkan perwakilan Ali, Abu Musa al-Asy'ari, dan perwakilan Mu'awiyah, Amr bin Ash untuk melakukan perundingan; sebuah perundingan yang merugikan pihak Ali bin Abi Thalib karena pihak Mu'awiyah melanggar perjanjian tersebut. Akibatnya, perselisihan semakin memanas, yang mengakibatkan terbentuknya kelompok ketiga, yaitu golongan Khawarij, yang merasa kecewa dengan sikap Ali dan Mu'awiyah. Komunitas Islam pun terpecah menjadi tiga golongan. Kemudian, salah satu dari khawarij asal kota Kufah, Abd al-Rahman bin Muljam, diketahui membunuh khalifah terakhir, Ali bin Abi Thalib. Para sahabat dan pengikut Ali, yang sebagian besar berasal dari penduduk Irak, kemudian membaiat Hasan bin Ali bin Abi Thalib R. a. Namun, hampir pada saat yang bersamaan, penduduk Syam juga membaiat Mu'awiyah sebagai khalifah. Hasan memimpin pasukan Iraq, sementara Mu'awiyah memimpin pasukan dari Syam. Ketika kedua pasukan tersebut bertemu, diupayakan untuk mengadakan perjanjian damai. Akhirnya, Hasan melepaskan jabatan khalifah dan menyerahkan kekuasaan kepada Mu'awiyah. Sejak saat itu, tongkat kekhalifahan berada di tangan Mu'awiyah, yang kemudian dikenal sebagai tahun persatuan ('am jamaah), sebagaimana yang telah disebutkan. Sebenarnya, jauh sebelumnya, masyarakat Syam telah membaiat Mu'awiyah sebagai khalifah, yakni setelah tragedi arbitrase (tahkim) pada tahun 37 H, sedangkan pembaiatan secara umum dilakukan setelah perjanjian damai tahun 41 H. Mu'awiyah menyerahkan perwalian Syam kepada Fadhalah bin Ubaid dan setelah itu kepada Abi Idris Khaulani. Pengawasan dipimpin oleh Qais bin Hamzah, sedangkan Sarjun bin Manshur al-Rumi diangkat sebagai sekretaris sekaligus asistennya. Mu'awiyah adalah khalifah yang pertama kali mengangkat pengawal atau penjaga dan menerapkan sistem pemerintahan monarki hereditas (kerajaan turun-temurun). Penting untuk dicatat bahwa pada hakikatnya, pembaiatan secara umum ('am al-jama'ah) tidak lebih dari pengakuan yang terjadi akibat tekanan dalam usaha menjaga kesatuan umat. Dengan kata lain, unsur kekuasaan dan keterpaksaan menggantikan kesukarelaan penuh atau permusyawaratan. Prinsip dasar yang mendasari sistem kekhalifahan telah menyimpang menuju sistem monarki. Berbagai opini pun muncul dari sejumlah kelompok Islam mengenai kekhalifahan Mu'awiyah. Kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, misalnya, mengakui kekhalifahannya setelah tahun persatuan, meskipun pengakuan ini lebih terkesan akibat keadaan, karena menurut mereka kekhalifahan Mu'awiyah belum berdiri atas dasar pembaiatan yang bebas dan umum. Pandangan yang berbeda datang dari kaum Syi'ah, yang hanya mengakui kekhalifahan Ali dan keturunannya serta beranggapan bahwa kelompok selain Syi'ah adalah perampas hak-hak mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui sama sekali kekhalifahan Mu'awiyah dan khalifah berikutnya.

Pola Pemerintahan masa dinasti Umayyah

Pola pemerintahan Dinasti Umayyah merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Islam, yang menandai peralihan signifikan dari model kepemimpinan kolektif atau khilafah yang berbasis musyawarah, seperti yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin, menuju sistem pemerintahan monarki yang bersifat turun-temurun. Berdirinya Dinasti Umayyah pada tahun 661 M, setelah terbentuknya kesepakatan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Hasan bin Ali, mengubah wajah pemerintahan Islam yang sebelumnya berorientasi pada konsep kekhalifahan yang lebih egaliter. Muawiyah bin Abi Sufyan, setelah menjadi khalifah pertama dari Dinasti Umayyah, mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berbeda dari sistem pemerintahan sebelumnya, serta membawa banyak perubahan dalam struktur politik dan sosial di wilayah kekuasaan Islam.

Salah satu perubahan terbesar yang dibawa oleh Dinasti Umayyah adalah penerapan sistem pemerintahan monarki yang bersifat hereditas (turun-temurun). Pada masa Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan dipilih berdasarkan konsensus dan musyawarah di kalangan sahabat, tetapi pada masa Dinasti Umayyah, kekuasaan khalifah menjadi warisan keluarga, yang diteruskan dari ayah ke anak. Muawiyah bin Abi Sufyan, yang berasal dari keluarga Umayyah, memulai tradisi ini dengan mengangkat putranya, Yazid, sebagai calon penerus, yang mengubah kekhalifahan menjadi dinasti yang tidak lagi didasarkan pada musyawarah, tetapi lebih kepada garis keturunan. Perubahan ini memunculkan berbagai ketegangan politik dan perselisihan, terutama di kalangan kelompok yang lebih mendukung model kekhalifahan yang berbasis konsensus, seperti golongan Ali dan pendukungnya. Meski begitu, sistem monarki ini berhasil membawa stabilitas politik, yang sangat penting untuk mengelola wilayah yang sangat luas dan beragam, mulai dari Asia Barat hingga Afrika Utara dan Spanyol.

Pemerintahan Umayyah mengadopsi model sentralisasi kekuasaan, di mana khalifah menjadi penguasa absolut dengan otoritas yang sangat besar. Khalifah tidak hanya memimpin urusan politik dan agama, tetapi juga memiliki kontrol penuh atas struktur administrasi negara dan kebijakan ekonomi. Dalam hal ini, khalifah berfungsi sebagai pemimpin tertinggi yang memutuskan segala sesuatu terkait dengan pemerintahan, termasuk urusan militer, keuangan, dan sosial. Di bawah khalifah, terdapat sejumlah dewan (diwan) yang membantu menjalankan pemerintahan. Beberapa diwan yang paling penting adalah Diwan al-Kharaj (pengelolaan pajak), Diwan al-Jund (militer), dan Diwan al-Rasa'il (surat-menyurat), yang semuanya bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Struktur pemerintahan yang terorganisir dan birokratis ini memberikan efisiensi dalam pengelolaan wilayah yang luas, meskipun juga menumbuhkan ketegangan antara pemerintah pusat dan wilayah-wilayah yang dikelola oleh para gubernur.

Di tingkat provinsi, pemerintahan dilakukan oleh para gubernur (wali) yang ditunjuk oleh khalifah. Gubernur ini bertanggung jawab untuk mengelola wilayah yang besar dan harus menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh khalifah. Meskipun gubernur memiliki otonomi dalam mengatur administrasi daerahnya, mereka tetap harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada pusat di Damaskus. Salah satu ciri khas pemerintahan Umayyah adalah penunjukan para gubernur yang sebagian besar berasal dari kalangan Arab, khususnya dari keluarga Umayyah sendiri, yang dianggap lebih loyal kepada khalifah dan dinasti. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penduduk non-Arab (mawali) yang merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan orang Arab, meskipun mereka telah memeluk Islam.

Kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Umayyah sangat bergantung pada pajak, yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Ada beberapa jenis pajak yang diterapkan, termasuk jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada non-Muslim, dan kharaj, yaitu pajak yang dikenakan pada tanah yang dikuasai oleh negara. Selain itu, di bawah pemerintahan Umayyah, terdapat pajak perdagangan dan penghasilan lainnya. Meski pajak ini penting untuk mendukung administrasi negara, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi militer, kebijakan pajak yang berat ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan, terutama di kalangan non-Arab yang merasa bahwa mereka dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang Arab. Ketidakadilan ini menjadi salah satu sumber utama ketegangan sosial dan politik selama pemerintahan Umayyah.

Salah satu kebijakan yang sangat penting dalam pemerintahan Dinasti Umayyah adalah ekspansi wilayah Islam yang sangat luas. Selama masa Dinasti Umayyah, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat, mencapai wilayah yang meliputi Asia Barat, Afrika Utara, dan bahkan Spanyol (Al-Andalus). Ekspansi ini dilakukan dengan tujuan untuk

menyebarkan Islam dan memperluas pengaruh politik dan ekonomi Islam. Namun, ekspansi ini juga tidak terlepas dari pertempuran dan konflik, baik dengan kerajaan-kerajaan lokal maupun dengan Kekaisaran Byzantium. Salah satu contoh penting ekspansi Umayyah adalah penaklukan wilayah Spanyol pada tahun 711 M, yang menjadi bagian dari wilayah Islam yang sangat signifikan di Eropa selama beberapa abad.

Di sisi lain, meskipun Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah dan memperkenalkan Islam ke berbagai belahan dunia, mereka juga menghadapi berbagai masalah internal. Salah satunya adalah ketidakpuasan dari kelompok mawali (orang non-Arab yang memeluk Islam), yang merasa diperlakukan tidak adil dan diskriminatif. Kelompok ini merasa bahwa meskipun mereka telah memeluk Islam dan berkontribusi dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam, mereka tetap diperlakukan lebih rendah dibandingkan dengan orang Arab. Ketidakadilan sosial ini memunculkan berbagai pemberontakan, termasuk pemberontakan terbesar yang dipimpin oleh kelompok Abbasiyah, yang akhirnya menggulingkan Dinasti Umayyah pada tahun 750 M.

Kehancuran Dinasti Umayyah menandai berakhirnya periode monarki Islam pertama, yang digantikan oleh Dinasti Abbasiyah. Namun, meskipun dinasti ini runtuh, warisan Dinasti Umayyah tetap mempengaruhi perkembangan politik dan peradaban Islam dalam banyak hal, termasuk dalam hal administrasi negara, kebijakan pajak, dan ekspansi wilayah. Dalam bidang budaya, Dinasti Umayyah juga berperan penting dalam mengembangkan seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh paling terkenal dari peradaban Umayyah adalah Masjid Umayyah di Damaskus, yang merupakan salah satu contoh terbesar dari arsitektur Islam awal. Selain itu, perkembangan bahasa Arab sebagai bahasa administratif yang digunakan di seluruh wilayah kekuasaan Islam juga merupakan salah satu kontribusi besar dari Dinasti Umayyah.

Secara keseluruhan, pola pemerintahan Dinasti Umayyah menunjukkan upaya untuk menciptakan stabilitas dalam pemerintahan yang terpusat, dengan fokus pada ekspansi wilayah dan pengelolaan pajak yang efisien. Namun, sistem pemerintahan yang sangat sentralistis dan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok non-Arab serta kebijakan pajak yang memberatkan akhirnya menimbulkan ketidakpuasan yang memicu pemberontakan dan runtuhnya dinasti ini. Meskipun demikian, Dinasti Umayyah telah memberikan warisan yang mendalam dalam hal pengelolaan pemerintahan, penyebaran Islam, serta perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan yang memengaruhi sejarah dunia Islam selanjutnya.

Ekspansi wilayah pada masa bani Umayyah

Ekspansi wilayah pada masa Bani Umayyah merupakan salah satu fenomena paling monumental dalam sejarah dunia Islam, di mana kekuasaan mereka meluas ke hampir seluruh wilayah yang dikenal pada masa itu. Dinasti Umayyah, yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 M setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, berhasil menciptakan sebuah kerajaan yang sangat luas dengan wilayah yang membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur. Ekspansi ini tidak hanya didorong oleh ambisi politik dan militer, tetapi juga oleh keinginan untuk menyebarkan agama Islam dan memperkenalkan budaya Arab ke berbagai wilayah.

Setelah Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil alih kekuasaan, salah satu langkah pertama yang diambil adalah memperkuat dan mengamankan wilayah kekuasaan di Timur Tengah, yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Persia Sassanid dan Kekaisaran Bizantium. Di wilayah ini, pasukan Umayyah berhasil menaklukkan Persia pada awal abad ke-7, menghapuskan Kekaisaran Sassanid yang sudah lemah. Keberhasilan ini memperkuat dominasi Islam di kawasan tersebut, dan wilayah-wilayah seperti Irak, Iran, serta kawasan sekitar Teluk Persia berada di bawah kendali Umayyah. Di sisi lain, pasukan Umayyah juga

terus melakukan serangan ke wilayah-wilayah Bizantium, dan dalam beberapa dekade, mereka berhasil merebut wilayah-wilayah penting seperti Armenia dan Kaukasus.

Namun, ekspansi terbesar Dinasti Umayyah terjadi di barat, di mana pasukan Muslim di bawah komando Tariq bin Ziyad melakukan penaklukan besar-besaran di Spanyol. Pada tahun 711 M, setelah mengalahkan pasukan Visigothic yang dipimpin oleh Raja Roderic dalam Pertempuran Guadalete, pasukan Muslim berhasil menaklukkan hampir seluruh Semenanjung Iberia, yang kemudian dikenal sebagai Andalusia. Wilayah ini tetap berada di bawah kontrol Muslim selama hampir delapan abad. Penaklukan Andalusia membawa dampak signifikan terhadap penyebaran agama Islam dan perkembangan budaya di Eropa Barat, yang menghasilkan kemajuan luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan filsafat, yang akhirnya memengaruhi Eropa pada Abad Pertengahan.

Di sisi timur, ekspansi Umayyah juga sangat pesat, terutama di Asia Tengah dan India. Wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Sassanid serta kawasan di sekitar Samarkand dan Bukhara menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah. Salah satu pencapaian penting dalam ekspansi timur ini adalah penaklukan Sindh (sekarang bagian dari Pakistan) pada tahun 711 M oleh pasukan yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim. Penaklukan Sindh membuka jalan bagi penyebaran Islam ke anak benua India dan membawa pengaruh budaya Arab ke wilayah tersebut. Ekspansi ini juga melibatkan wilayah Transoxiana (sekarang Uzbekistan, Tajikistan, dan Kazakhstan), yang menjadi pusat pertemuan berbagai budaya dan agama.

Di wilayah utara, Umayyah juga melancarkan serangan ke wilayah Kaukasus dan Anatolia. Meskipun tidak seluruhnya berhasil ditaklukkan, pasukan Umayyah berhasil menciptakan pengaruh besar di wilayah ini, yang membuat kekuasaan mereka terjaga dan memperluas batas-batas kekhalifahan hingga mencapai Anatolia, yang saat itu berada di bawah kendali Kekaisaran Bizantium. Serangan-serangan ini menunjukkan ambisi besar Bani Umayyah untuk memperluas pengaruh Islam ke wilayah yang lebih jauh, bahkan hingga perbatasan Eropa Timur.

Selain penguasaan wilayah yang luas, ekspansi ini juga memperkenalkan banyak aspek budaya dan sosial baru. Misalnya, sistem administrasi yang lebih terstruktur dan efisien diperkenalkan, yang termasuk penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan dan perdagangan. Selain itu, dinasti ini juga mendorong pengembangan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sistem irigasi yang lebih maju, yang memungkinkan pengelolaan wilayah yang sangat luas dengan lebih efektif.

Namun, meskipun keberhasilan dalam ekspansi wilayah sangat signifikan, tantangan besar muncul seiring dengan semakin luasnya wilayah yang dikuasai. Konflik internal antara kelompok-kelompok dalam umat Islam, khususnya ketegangan antara kelompok Sunni yang mendukung pemerintahan Umayyah dan kelompok Syiah yang menentang mereka, mulai berkembang. Selain itu, semakin banyaknya non-Arab yang berada di wilayah yang ditaklukkan menyebabkan ketidakpuasan terhadap pengelolaan pemerintahan yang dianggap lebih mengutamakan kaum Arab. Pemberontakan-pemberontakan seperti Pemberontakan Khawarij dan ketegangan politik di berbagai wilayah juga mulai mengganggu kestabilan pemerintahan Umayyah.

Pada akhirnya, meskipun Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan sangat pesat, ekspansi yang sangat luas ini juga mengandung tantangan dalam hal pengelolaan dan pemerintahan yang efisien. Kejatuhan Dinasti Umayyah pada tahun 750 M di tangan Dinasti Abbasiyah, yang mengakhiri pemerintahan Umayyah di sebagian besar wilayah kekuasaan mereka, menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah yang sangat luas membutuhkan kebijakan yang lebih inklusif dan lebih dapat menanggapi kebutuhan berbagai kelompok yang ada. Namun, meskipun Dinasti Umayyah

tidak bertahan lama, pengaruh mereka terhadap penyebaran Islam dan pembentukan peradaban Islam di berbagai belahan dunia tetap bertahan lama. Ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Dinasti Umayyah telah meletakkan dasar bagi perkembangan lebih lanjut dari kebudayaan, pemerintahan, dan penyebaran agama Islam ke seluruh dunia.

Peradaban Islam pada masa bani Umayyah

Kekuasaan Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun dengan total 14 Khalifah yang pernah memimpin. Pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I yang menjabat dari tahun 661 hingga 679 M. Diikuti oleh Yazid bin Muawiyah atau Yazid I dari tahun 679 hingga 683 M, kemudian Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II pada tahun 683 M. Selanjutnya, Marwan bin Hakam atau Marwan I memimpin dari tahun 683 hingga 684 M, diikuti oleh Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa dari tahun 684 hingga 705 M. Walid bin Abdul Malik atau Walid I memimpin dari tahun 705 hingga 715 M, dan dilanjutkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik dari tahun 715 hingga 717 M. Umar bin Abdul Aziz kemudian memimpin dari tahun 717 hingga 720 M, diikuti oleh Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II dari tahun 720 hingga 724 M. Hisyam bin Abdul Malik memimpin dari tahun 724 hingga 743 M, sementara Walid bin Yazid atau Walid II menjabat dari tahun 743 hingga 744 M. Selanjutnya, Yazid bin Walid berkuasa pada tahun 744 M, diikuti oleh Ibrahim bin Walid pada tahun yang sama. Terakhir, Marwan bin Muhammad atau Marwan II memimpin dari tahun 744 hingga 750 M.

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kisah Mu'awiyah seharusnya diintegrasikan dengan kisah Kulafa Rasyiddin, karena kisah Mu'awiyah memiliki kedudukan yang signifikan pada periode setelah Kulafa Rasyiddin, baik dalam hal keutamaan, keadilan, serta persahabatan, dan hal tersebut perlu dilakukan. Sistem pendidikan pada Dinasti Bani Umayyah tidak terlepas dari pembangkitannya, kejatuhannya di Damaskus, dan kebangkitannya di Andalusia. Pada masa awal Bani Umayyah terdapat dua sistem pendidikan yang berbeda. Pertama, pendidikan untuk anak-anak khalifah dan pejabat, yang ditujukan untuk meraih jabatan serta otoritas politik, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemimpin resmi yang memperoleh dukungan dari lembaga negara yang kuat. Kedua, pendidikan untuk anak-anak dan masyarakat umum, yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan keyakinan agama dan diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kharismatik serta berpengetahuan. Secara umum, kondisi pendidikan pada masa kekuasaan Bani Umayyah menunjukkan bahwa tidak semua khalifah menerapkan model pembelajaran yang serupa. Beberapa khalifah, seperti Umar bin Abdul Aziz, dikenal sebagai khalifah yang religius atau saleh. Selain itu, pendekatan pendidikan pada masa pemerintahan Muawiyah II di Andalusia juga lebih demokratis, yang mampu memperkuat pendidikan melalui kolaborasi antara ulama dan umara. Fuji Rahmadi. Pada masa Bani Umayyah, tingkat pendidikan hampir setara dengan kondisi saat ini. Tahap pertama dikenal sebagai Kuttab, di mana anak-anak diajarkan menulis, menafsirkan, dan menghafal Al-Qur'an, serta mempelajari dasar-dasar ajaran Islam. Setelah menyelesaikan pembelajaran di Kuttab, mereka melanjutkan pendidikan di masjid. Pendidikan di masjid dibagi menjadi dua kategori: pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Seorang guru pada tingkat menengah mungkin belum bisa dianggap sebagai ulama yang hebat, sedangkan guru di tingkat yang lebih tinggi adalah individu yang berpendidikan tinggi dan dikenal bijaksana serta bertakwa. Pemerintahan Bani Umayyah sangat mementingkan pendidikan dan menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Upaya ini bertujuan untuk mendorong ilmuwan, seniman, dan akademisi dalam mengembangkan berbagai bidang ilmu serta memberikan pelatihan bagi calon ilmuwan masa depan. Perkembangan dan pertumbuhan sistem pendidikan di kalangan masyarakat Islam pada zaman itu mengawali dengan kedatangan Islam, meski hanya terjadi sedikit peningkatan seiring pertumbuhan

negara Islam. Meski Bani Umayyah menghadapi berbagai masalah retorika dan politik di dalam masyarakat Islam, hal ini tidak menghalangi kemajuan pendidikan. Pada masa ini, pendidikan mulai dianggap sebagai kegiatan yang mandiri dan berkualitas tinggi, yang memungkinkan setiap orang untuk memperoleh pengetahuan kapan saja. Dengan melihat situasi saat ini, dunia pendidikan Islam perlu menciptakan lingkungan yang kondusif, manusiawi, harmonis, dinamis, dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta sistem teknologi, sambil tetap menjunjung tinggi ajaran-ajaran Islam.

Meskipun Bani Umayyah meraih berbagai kemajuan, konflik internal tetap tidak bisa dihindari. Banyak pemberontakan muncul yang kemudian berujung pada perang saudara. Terdapat beberapa penyebab mendasar dari jatuhnya Dinasti Bani Umayyah. Salah satu faktor adalah luasnya wilayah yang dikuasai sehingga tak mampu diimbangi dengan sistem komunikasi yang baik, menyebabkan pusat tidak dapat dengan cepat mengenali ancaman keamanan. Selain itu, kelemahan pemimpin khalifah turut berkontribusi. Hanya sedikit khalifah yang mampu menjaga stabilitas negara, sementara yang lainnya lebih memilih mengurung diri di istana serta terjerumus dalam kebiasaan buruk seperti mengonsumsi alkohol. Keadaan ini menciptakan konflik antar kelompok serta korupsi di kalangan para komandan. Dengan berakhirnya masa pemerintahan Marwan bin Muhammad atau Marwan II, berakhir pula kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Jatuhnya dinasti ini disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam menerapkan kebijakan yang konsisten dari waktu ke waktu. Meskipun dinasti Umayyah tampak kacau, dinasti ini berhasil membangun masyarakat Islam yang tertib. Pada masa Bani Umayyah, juga didirikan kantor catatan nasional serta kantor pos yang menghubungkan berbagai daerah yang dikuasai. Letak kekuasaan Dinasti Bani Umayyah menjadi tahap awal perkembangan ilmu pengetahuan serta cara pemerintahan yang tepat dan baik.

KESIMPULAN

Pembentukan Dinasti Umayyah dimulai setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang digantikan oleh putranya, Hasan. Namun, situasi politik yang tidak stabil dan tekanan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan menyebabkan Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Mu'awiyah melalui perjanjian damai. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Khulafa' al-Rasyidin dan awal mula berdirinya Dinasti Umayyah pada tahun 41 H/661 M, yang dikenal dengan tahun persatuan ('am jama'ah).

Mu'awiyah kemudian mendirikan pemerintahan monarki yang diwariskan turun-temurun, berbeda dengan sistem khalifah sebelumnya yang berbasis pada musyawarah dan konsensus. Dengan berkuasanya Mu'awiyah, sistem pemerintahan Islam berubah menjadi monarki, dan beliau menjadi khalifah pertama yang menerapkan sistem ini. Peristiwa ini juga memperburuk perpecahan di kalangan umat Islam, di mana kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah meskipun mengakui kekhalifahan Mu'awiyah, namun lebih karena keadaan, sementara kaum Syi'ah menolak kekhalifahan Mu'awiyah dan hanya mengakui kekhalifahan Ali dan keturunannya.

Secara keseluruhan, pembentukan Dinasti Umayyah menandai perubahan besar dalam struktur kekuasaan Islam dan memperburuk perpecahan politik dalam umat Islam, yang dampaknya masih terasa hingga saat ini.

Dinasti ini membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan Islam, terutama dengan beralihnya sistem kekhalifahan yang berbasis musyawarah pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi sistem monarki hereditas pada masa Umayyah. Mu'awiyah bin Abi Sufyan, sebagai khalifah pertama, menetapkan kekhalifahan sebagai warisan keluarga dan memulai pemerintahan yang sangat sentralistik. Sistem ini membawa stabilitas politik dalam mengelola wilayah yang luas, namun juga menimbulkan ketegangan sosial, terutama

terkait dengan kebijakan diskriminatif terhadap non-Arab (mawali) dan ketidakadilan dalam pemungutan pajak.

Pemerintahan Umayyah mengandalkan birokrasi yang efisien dan penerapan pajak yang cukup berat, namun juga memperluas wilayah Islam dengan pesat, termasuk penaklukan Spanyol. Meskipun dinasti ini sukses dalam hal ekspansi dan pengelolaan administrasi, ketidakpuasan dari kelompok mawali serta kebijakan diskriminatif memicu pemberontakan besar yang akhirnya menggulingkan Dinasti Umayyah pada 750 M.

Walaupun runtuh, warisan Dinasti Umayyah tetap memberi dampak besar dalam bidang administrasi, budaya, dan pengembangan bahasa Arab sebagai bahasa administratif. Pencapaian ini, terutama dalam seni dan arsitektur, serta dalam penyebaran Islam, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan sejarah dunia Islam berikutnya.

Dinasti ini berhasil menciptakan kerajaan yang sangat luas, dengan wilayah yang membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur. Ekspansi ini didorong oleh keinginan untuk memperluas pengaruh politik dan agama Islam, serta memperkenalkan budaya Arab. Keberhasilan terbesar terjadi di barat, dengan penaklukan Spanyol (Andalusia) yang bertahan selama hampir delapan abad, serta di timur dengan penaklukan Sindh (Pakistan) dan wilayah Asia Tengah.

Namun, meskipun ekspansi wilayah Umayyah sangat sukses, tantangan besar muncul akibat pemerintahan atas wilayah yang sangat luas, yang menciptakan ketegangan politik, terutama terkait dengan ketidakpuasan kelompok non-Arab dan ketegangan internal antara kelompok Sunni dan Syiah. Pada akhirnya, ekspansi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan yang lebih inklusif dan kebijakan yang dapat mengakomodasi beragam kelompok. Meskipun Dinasti Umayyah runtuh pada 750 M, pengaruh mereka dalam penyebaran Islam dan peradaban Islam tetap bertahan, meletakkan dasar bagi perkembangan kebudayaan, pemerintahan, dan penyebaran agama Islam lebih lanjut.

meskipun dinasti ini mengalami sejumlah tantangan internal dan eksternal, mereka berhasil menciptakan kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, terutama dalam pendidikan dan administrasi. Dinasti Umayyah mendirikan sistem pendidikan yang terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari Kuttab hingga pendidikan di masjid, yang menghasilkan ilmuwan dan pemimpin yang berpengetahuan. Pendekatan yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan agama membuka jalan bagi perkembangan budaya dan pemikiran Islam. Namun, konflik internal, ketidakmampuan mengelola wilayah yang sangat luas, serta kelemahan pemimpin khalifah berkontribusi pada jatuhnya dinasti ini pada tahun 750 M.

Meskipun demikian, pemerintahan Bani Umayyah berhasil meninggalkan warisan penting, seperti pengembangan sistem administrasi yang efisien, pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi, serta pengenalan kantor catatan nasional dan kantor pos yang mempererat hubungan antara berbagai wilayah. Oleh karena itu, meskipun Dinasti Umayyah mengalami keruntuhan, dampaknya terhadap perkembangan masyarakat Islam, ilmu pengetahuan, dan sistem pemerintahan tetap bertahan lama, memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan peradaban Islam selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam* (Amzah, 2024)
- Anwar, Ahmad Masrul, 'Pertumbuhan Dan Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Bani Umayyah', *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1.1 (2015), pp. 47-76
- Harahap, Saidatul Husna, Lutfi Ardiansyah Pasaribu, Lyona Beby Melinda, Akbar Muhammad Silaen, and Kelvin Alvaro, 'Perkembangan Peradaban Islam Pada Dinasti Bani Umayyah', *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 2.01 (2024)
- Haris, Munawir, 'Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah', *Tasamuh: Jurnal*

- Studi Islam, 10.2 (2018), pp. 391–406
- Hasan, Hasan Ibrahim, 'Sejarah Dan Kebudayaan Islam', 2020
- Khoirudin, Muhammad Luthfi Anam, and Kholid Mawardi, 'Periodisasi Dan Perkembangan Dinasti Umayyah', *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 4.1 (2024), pp. 53–61
- Rais, Muhamamd Dhiauddin, *Teori Politik Islam* (Gema Insani, 2001)